



► Risalah Kebijakan ILO

April 2020

Pelindungan pekerja migran selama pandemi COVID-19

Rekomendasi bagi Pembuat Kebijakan dan Konstituen

Ringkasan kebijakan ini menyediakan informasi dan mengidentifikasi sejumlah rekomendasi kunci untuk membantu pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam merancang respons kebijakan COVID-19 yang dapat membantu memastikan perlindungan pekerja migran dan menginformasikan respons mengenai perlindungan pengungsi dan orang-orang terlanjur yang bekerja di negara yang bukan negara mereka sendiri, terpilah berdasarkan jenis kelamin dan berlandaskan pada standar ketenagakerjaan internasional terkait,¹ serta panduan ILO dan praktik baik. Dokumen ini akan diperbarui secara berkala bila situasinya berubah.

► Pendahuluan

Krisis COVID-19 memiliki dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian global, bisnis dan pekerja. ILO memperkirakan bahwa hampir 2,2 miliar pekerja, yang mewakili 68 persen angkatan kerja global, tinggal di negara-negara yang diharuskan atau disarankan untuk melakukan penutupan tempat kerja.² Pekerja migran mewakili 4,7 persen pekerja global, yang terdiri dari 164 juta pekerja,³ dengan hampir separuhnya adalah perempuan. Di banyak negara, pekerja migran merepresentasikan pangsa angkatan kerja yang jauh lebih besar yang memberikan kontribusi penting terhadap masyarakat dan perekonomian,⁴ dan berada di garis depan guna melaksanakan pekerjaan penting dalam perawatan kesehatan, transportasi, layanan, konstruksi serta pertanian dan pemrosesan agro-pangan.⁵ Namun, sebagian besar pekerja migran terkonsentrasi di sektor perekonomian dengan tingkat pekerjaan sementara,

informal atau tanpa perlindungan yang tinggi, ditandai dengan upah rendah dan kurangnya perlindungan sosial, termasuk dalam pekerjaan perawatan yang di banyak negara sebagian besar dilakukan oleh pekerja migran perempuan.⁶

Pekerja migran termasuk di antara yang paling rentan. Laporan-laporan mendokumentasikan meningkatnya tingkat diskriminasi dan xenofobia terhadap pekerja migran dan dalam beberapa kasus kerawanan pangan, pemutusan hubungan kerja, memburuknya kondisi kerja termasuk pemotongan atau tidak dibayarnya upah, kondisi hidup yang berdesakan atau tidak memadai dan meningkatnya pembatasan pergerakan atau pemulangan paksa (di mana mereka kemungkinan dicap sebagai pembawa virus).⁷

1 ILO 2016 General Survey on Promoting Fair Migration para 113.

2 ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edition

3 ILO Global Estimates on International Migrant Workers

4 OECD/ILO 2018, How Immigrants Contribute to Developing Countries' Economies, OECD Publishing, Paris,

5 ILO memperkirakan 11 juta migran perempuan bekerja di rumah, banyak di pekerjaan perawatan di rumah. Ibid. Meningkatnya permintaan akan pekerja perawatan kesehatan dapat membuka lapangan kerja di masa depan bagi migran berketerampilan sedang hingga tinggi.

6 Care work and care jobs for the future of decent work.

7 Lihat, misalnya, www.nytimes.com; www.irishtimes.com. Lihat juga ILO guidance brief on COVID-19 in Lebanon and COVID-19: Impact on migrant workers and country response in Malaysia, 14 April 2020 yang mengacu pada keadaan pekerja lepas dan pekerja harian (yang sebagian besar berstatus ilegal).

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengkhawatirkan terjadinya peningkatan tingkat kekerasan, terutama pada mereka yang bekerja di rumah tangga di mana pekerja perempuan mendominasi.⁸

Pekerja migran kerap kali menjadi kelompok pertama yang diberhentikan namun menjadi yang terakhir mendapatkan akses ke tes atau perawatan yang sesuai dengan pekerja di dalam negeri. Mereka seringkali dikecualikan dari respons kebijakan COVID-19 nasional, misalnya subsidi upah, tunjangan pengangguran atau jaminan sosial dan langkah-langkah perlindungan sosial. Jika akses ke tes COVID-19 atau perawatan medis tersedia, mereka pun mungkin tidak dapat mengaksesnya karena takut ditahan atau dideportasi, terutama mereka yang berstatus non prosedural. Dalam kasus pekerja rumah tangga, pekerja rumahan, pekerja pertanian dan lainnya dalam perekonomian informal, pengecualian di banyak negara berasal dari fakta bahwa undang-undang ketenagakerjaan tidak menganggap mereka sebagai pekerja.

Dalam beberapa kasus, pembatasan perjalanan menjebak migran di negara tujuan dengan sedikit pilihan untuk dapat kembali pulang. Pemutusan hubungan kerja yang dialami pekerja migran tidak hanya kerap mengakibatkan hilangnya pendapatan tetapi juga kedaluwarsanya visa atau izin kerja, yang membuat migran menjadi berstatus tidak berdokumen atau iregular. Pembatasan perjalanan juga berarti banyak pekerja migran dicegah untuk mengambil pekerjaan di luar negeri di mana mereka telah memiliki kontrak untuk pekerjaan tersebut atau banyak dari mereka mungkin telah membayar biaya dan ongkos perekrutan yang tinggi. Ini, pada gilirannya, dapat mengarah pada pergerakan iregular atau non-prosedural serta potensi terjerat utang dan perdagangan manusia. Kehilangan pendapatan juga mengakibatkan berkurangnya uang yang dikirim ke kampung halaman oleh pekerja migran, dengan perkiraan pengiriman uang akan turun hampir USD 110 miliar tahun ini.⁹

► Pertimbangan utama untuk memastikan respons kebijakan yang dikembangkan berbasis hak dan sensitif gender

Dampak ekonomi COVID-19 pada pekerja migran serta respons pemerintah saat ini bersifat dinamis

dan bervariasi tergantung pada negara dan wilayah. Saat peluang ekonomi menurun, permintaan pekerja migran secara keseluruhan mengalami penurunan di beberapa sektor, sementara untuk beberapa sektor lainnya mengalami peningkatan seperti perawatan kesehatan dan pertanian musiman. Mengingat banyaknya pekerjaan yang tersedia di sektor-sektor ini merupakan pekerjaan sementara, informal atau tidak terlindungi, pemantauan dampak sosial dan ekonomi terhadap pekerja migran menjadi semakin penting dalam menangani kerentanan khusus dan melindungi hak-hak mereka. Pemantauan juga akan membantu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja untuk jangka pendek dan panjang.

Dampak pada pekerja migran perempuan terlihat parah mengingat besarnya jumlah mereka dalam perekonomian informal dan dikalangan pekerja tidak berdokumen di banyak negara. Pekerja migran perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja kesehatan dan perawatan garis depan berada dalam kelompok berisiko sangat tinggi terdampak COVID-19. Lebih lanjut, mereka yang mengalami peningkatan tingkat kekerasan atau pelecehan – di akomodasi, tempat kerja, fasilitas karantina atau saat PHK dan kepulangan – saat ini tidak memiliki banyak pilihan untuk layanan dukungan. Secara global, banyak layanan dukungan bagi pekerja migran dan khususnya bagi yang menangani kekerasan terhadap perempuan terpaksa mengurangi dan menutup layanan atau hanya melakukan melalui daring/telepon.

Kebijakan dan langkah berbasis hak yang sensitif gender dapat membantu mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan hak ketenagakerjaan dalam waktu dekat, mengurangi biaya pemulihan untuk bisnis, saat perekonomian pulih kembali, dan mempertahankan mata pencarian dan tunjangan sosial pekerja migran dan keluarganya dalam jangka menengah hingga panjang. Kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan semua kementerian dan pemangku kepentingan terkait merupakan kunci. Selain itu, dengan mencakup pekerja migran laki-laki dan perempuan dalam respons COVID-19 nasional, negara-negara dapat lebih melindungi kesehatan dan keselamatan semua pekerja dan mencegah penyebaran pandemi. Pencakupan pekerja migran akan membantu mengurangi risiko semakin tertinggalnya mereka saat pandemi mereda.

Tiga bidang kegiatan yang merupakan kunci: pencakupan pekerja migran dalam respons COVID-19 nasional; kerja sama bilateral antara negara asal dan negara tujuan; dan dialog sosial dan keterlibatan penuh organisasi pengusaha dan pekerja dalam pengembangan respons COVID-19. Juga relevan untuk menginformasikan respons dalam perlindungan pengungsi dan orang-orang terlantar lainnya.

8 Lihat, www.hrw.org; www.diariolibre.com

9 www.worldbank.org

Pencakupan pekerja migran dalam respons kebijakan COVID-19 nasional dapat membantu memastikan terwujudnya kesetaraan dan keadilan sosial

Pekerja migran juga tercakup di dalam respons kebijakan pendapatan nasional dan respons kebijakan terkait lainnya: Kurang terjaminnya pendapatan menciptakan dorongan untuk tetap bekerja saat sakit dan meningkatkan risiko kesehatan masyarakat dalam penyebaran COVID-19 lebih lanjut. Pemerintah harus mencakup pekerja migran secara konsisten dan sistematis sebagai populasi sasaran dalam respons COVID-19, dengan perhatian khusus diberikan pada kebutuhan pekerja migran perempuan, termasuk peningkatan risiko mengalami kekerasan saat karantina.¹⁰ Respons kebijakan berdasarkan data pemantauan yang terpilah menurut jenis kelamin dan penilaian dampak dapat mendukung lebih banyak dukungan keuangan berbasis bukti dan langkah-langkah kebijakan ekonomi yang terukur, termasuk dalam mempertimbangkan bantuan tunai bagi pekerja migran yang kehilangan mata pencariannya akibat COVID-19.¹¹

Sejumlah negara dan pemerintah daerah telah mulai menetapkan langkah-langkah yang lebih komprehensif guna mendukung pekerja migran yang mengalami kehilangan pendapatan yang signifikan selama pandemi, seperti layaknya pekerja non-migran. Misalnya, Brasil membentuk sebuah program dukungan bagi penganggur untuk menghadapi masa darurat COVID-19 di mana migran dan pengungsi, serta pekerja informal, juga dapat memperoleh tunjangan. Chili membentuk sebuah program Upah Kedaruratan COVID-19 (Bono de Emergencia COVID-19) bagi keluarga rentan yang menyasar migran berstatus prosedural atau regular di negara tersebut. Selandia Baru membuat Skema Subsidi Upah yang juga tersedia untuk migran, di antara negara-negara lain, misalnya Tunisia.¹²

Di California, sebuah dana baru yang dapat mencapai USD 125 juta sedang dibentuk untuk memberikan dukungan pendapatan kepada pekerja migran tanpa memandang status mereka.¹³

Perluas akses ke layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi pekerja migran. Pekerja migran harus diintegrasikan ke dalam mekanisme risiko bersama (*risk pooling*), seperti layaknya warga negara, guna memastikan asuransi sosial dan universalitas cakupan serta solidaritas dalam pembiayaan.¹⁴ Tunjangan sakit dapat membantu melindungi pekerja migran maupun masyarakat setempat.

Sejumlah negara telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan pekerja migran dicakup dalam skema perlindungan sosial nasional dan memiliki akses gratis ke tes dan skrining tanpa memandang status mereka. Portugal, misalnya, telah mengadopsi ketentuan untuk memperlakukan migran seperti penduduk tetap selama pandemi untuk memastikan mereka memiliki akses ke layanan publik, termasuk Layanan Kesehatan Nasional.¹⁵ Di antara yang lain, Qatar, Arab Saudi¹⁶ dan Malaysia¹⁷ menyediakan skrining dan tes gratis bagi pekerja migran.¹⁸

Standar ketenagakerjaan internasional memberikan dasar bagi respons kebijakan yang inklusif, berkelanjutan dan adil

Standar ketenagakerjaan internasional dan hak-hak mendasar merupakan pondasi bagi respons kebijakan yang adil dan efektif, yang memberikan “kompas pekerjaan yang layak untuk respons COVID-19 yang dapat membantu lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lain memastikan pendekatan berbasis hak digunakan dalam perlindungan pekerja migran laki-laki dan perempuan. Migran dan pengungsi menghadapi hambatan yang sama dalam mewujudkan hak-hak mereka di tempat kerja dan keduanya dicakup oleh standar ketenagakerjaan internasional.” (Standar ILO dan COVID 19)

10 Tingkat kekerasan dalam rumah tangga meningkat selama pandemi sebagaimana halnya kecenderungan saat keadaan darurat: www.channelnewsasia.com; www.theglobeandmail.com; www.themarshallproject.org.

11 Negara-negara anggota ILO mengadopsi pedoman yang bermanfaat dalam hal ini, lihat Konvensi Tunjangan Perawatan Medis dan Tunjangan Sakit, 1969 (No. 130), dan Rekomendasi Tunjangan Perawatan Medis dan Tunjangan Sakit, 1969 (No. 134)

12 Selandia Baru: www.employment.govt.nz; Qatar Development Bank (QDB) meluncurkan Program Jaminan Nasional QAR 3bn (USD 825 juta) yang memberikan jaminan kepada bank lokal untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada perusahaan swasta untuk mendukung pembayaran upah dan sewa yang dapat menguntungkan pekerja migran. www.thepeninsulaqatar.com. Kementerian Sosial Tunisia mengeluarkan rekomendasi kepada pengusaha dan lembaga pemerintah, serta tuan tanah, untuk perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap migran sub-Sahara dan menegaskan ketersediaan bantuan non-tunai dan tunai bagi migran yang rentan; dukungan untuk OMS; dan keringanan untuk berakhirnya izin kerja dan imigrasi, Ministry of Social Affairs, Note on the situation of migrants in Tunisia, 7 April 2020.

13 www.gov.ca.gov

14 Biaya akses ke perawatan kesehatan yang terjangkau harus ditanggung bersama melalui mekanisme pengumpulan risiko yang luas dan harus dibiayai “dengan pembayaran rutin berkala yang dapat berbentuk iuran asuransi sosial atau pajak atau keduanya”.

15 www.schengenvisa.info.com. Polandia dan Belgia juga memperpanjang visa untuk migran dalam durasi terbatas.

16 www.al-monitor.com

17 www.ilo.org

18 www.al-monitor.com

Pengungsi, misalnya pengaturan kamp, mungkin menghadapi risiko dampak kesehatan dan mata pencarian yang lebih akut dari pandemi ini dan, untuk itu, pertimbangan khusus harus diberikan pada situasi mereka. Sebagai anggota Komite Eksekutif Jaringan PBB untuk Migrasi, ILO berkontribusi pada panduan global yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia tentang kesiapsiagaan, pencegahan dan pengendalian penyakit virus Korona bagi para pengungsi dan migran dalam pengaturan non-kamp. Ini melengkapi panduan lebih lanjut oleh UNHCR tentang pesan-pesan perlindungan utama, dan IASC, Pedoman Sementara tentang Peningkatan Wabah COVID-19 dalam Operasi Kesiapsiagaan dan Respons di Kamp dan Pengaturan seperti Kamp.

Berikan informasi yang memadai dan dapat diakses. Efektivitas komunikasi harus ditingkatkan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan di masyarakat dan di tempat kerja, termasuk antara organisasi pengusaha dan pekerja. Di beberapa negara, ILO mendukung Pusat Sumber Daya Pekerja Migran (Migrant Worker Resources Centre/MRC) dan para mitra untuk memberikan informasi yang relevan kepada pekerja migran dan komunitas mereka tentang berbagai hal, termasuk bantuan terkait COVID-19, bantuan hukum bagi pekerja migran yang mengalami pelanggaran hak-hak pekerja, pelatihan dan bahan-bahan tentang kesehatan dan keselamatan, termasuk masker dan pembersih tangan.¹⁹

Pastikan pekerja migran memiliki status legal atau tidak jatuh dalam status ilegal: Langkah-langkah khusus untuk memfasilitasi perpanjangan visa, amnesti, pembaruan izin kerja atau izin tinggal dapat

berkontribusi untuk memastikan akses ke layanan penting bagi pekerja migran maupun keberlanjutan kontribusi mereka kepada angkatan kerja yang berstatus prosedural atau regular, guna menghindari peningkatan iregular atau non-prosedural. Pemerintah Italia sedang mempertimbangkan untuk melegalisasi status sekitar 200.000 migran karena kekurangan tenaga kerja akibat penutupan perbatasan.²⁰ Beberapa negara telah memperpanjang visa kerja migran, atau amnesti dan melakukan langkah-langkah lain untuk mengurangi kendala yang dihadapi oleh pekerja migran dan keluarganya yang tinggal di negara tujuan (misalnya Bahrain,²¹ Kenya,²² Kuwait,²³ Lebanon,²⁴ Maroko, Afrika Selatan,²⁵ Thailand,²⁶ Uni Emirat Arab/UEA²⁷).

Tangani risiko khusus pekerja migran yang tinggal di perumahan komunal atau perumahan di tempat kerja

Dalam beberapa kasus, pekerja migran tinggal di asrama khusus dan pusat penerimaan migran sementara atau pusat pelatihan, rumah tahanan imigrasi, kamp sementara atau kondisi hidup komunal. Selain perumahan jangka panjang pekerja migran di asrama, misalnya di Singapura,²⁸ pekerja migran tinggal di fasilitas semacam itu untuk sementara. Ini mencakup migran yang mungkin baru saja tiba sebelum COVID-19, pengungsi yang mengajukan suaka atau migran yang sedang menunggu penerbitan izin tinggal/kerja, mereka yang mengupayakan reunifikasi keluarga, mereka yang transit dan lain-lain. Kondisi hidup di tempat tinggal kerap berdesakan di mana memerlukan berbagi kamar mandi, fasilitas memasak dan makan dan tidak memadai untuk membatasi penyebaran COVID-19, sebuah potensi risiko bagi mereka yang berada di fasilitas semacam itu atau di dekatnya. Pemerintah dan pengusaha harus memastikan bahwa di asrama atau akomodasi komunal utilitas dasar

19 Misalnya, di Thailand, ILO mendukung MAP Foundation, HomeNet and the Human Right and Development Foundation (HRDF) dalam menjalankan MRC mereka masing-masing di Chiang Mai, Bangkok dan Mae Sot, yang memberikan informasi kepada pekerja migran dan komunitas mereka tentang berbagai hal, termasuk COVID-19, dan bantuan hukum bagi pekerja migran yang mengalami pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan. Bermitra dengan Raks Thai Foundation, ILO mengadakan pelatihan dan menyebarkan informasi COVID-19 dan alat pelindung diri kepada pekerja migran Kamboja, khususnya perempuan, di Rayong dan Chonburi. Masker, pembersih tangan dan materi komunikasi kesehatan disediakan. Melalui ini dan mitra berbasis masyarakat lainnya, ILO mengumpulkan informasi untuk memantau dampak COVID-19 terhadap pekerja migran. Di Malaysia, MRC dijalankan oleh Malaysian Trades Union Congress (MTUC), Tenaganita, dan Persatuan Sahabat Wanita Selangor (PSWS) mendistribusikan makanan dan memberikan bantuan hukum dan penampungan bagi pekerja migran yang terdampak COVID-19. Di Singapura, ILO akan bekerja sama dengan NGO HOME untuk memberikan manajemen kasus, konseling psikososial, dan penampungan bagi pekerja migran perempuan.

20 www.middleeastmonitor.com

21 Bahrain mengindikasikan penghentian biaya kerja bulanan dan penerbitan atau pembaruan izin kerja selama 3 bulan mulai 1 April, dan menurunkan biaya untuk izin kerja fleksibel, www.gulf-insider.com and <https://lmra.bh>. Negara ini juga memberikan amnesti bagi migran dalam situasi ilegal hingga 31 Desember 2020, sehingga migran tidak akan didenda untuk melegalisasi status tinggal mereka atau meninggalkan negara tersebut: www.migrant-rights.org.

22 Sejalan dengan Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Pelengkap), 1975 (No. 143), rancangan Pedoman Pandemi COVID-19 di Tempat Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan dan Perlindungan Sosial Kenya mengindikasikan bahwa pekerja migran legal yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19, tidak akan dianggap sebagai migran ilegal. Izin tinggal atau izin kerja mereka akan tetap berlaku untuk periode waktu yang ditentukan sebelumnya.

23 Kuwait – perpanjangan visa jika pekerja jatuh menjadi berstatus ilegal selama penghentian, www.arabnews.com.

24 Lihat, www.ilo.ch/beirut

25 Penutupan Pusat Penerimaan Pengungsi selama karantina, Departemen Dalam Negeri mengumumkan bahwa klien dari pusat-pusat ini yang visanya kedaluwarsa tidak akan dihukum sepanjang mereka melegalisasi visa mereka saat karantina dicabut

26 Pada tanggal 8 April, Pemerintah Thailand mengumumkan bahwa pekerja migran yang memegang izin lintas perbatasan yang sah, yang dokumennya akan kedaluwarsa pada tanggal 31 Maret, diizinkan untuk terus bekerja hingga 30 April 2020. Pada tanggal 15 April, Pemerintah Thailand memperpanjang batas waktu perpanjangan izin kerja untuk 555.993 pekerja migran yang tersisa yang terdaftar di bawah proses verifikasi nasional (dari 1.266.351 pekerja migran yang memenuhi syarat) yang belum menyelesaikan proses dari 30 Juni hingga 30 November 2020. Ketentuan ini dapat diperpanjang hingga 1.000.000 pekerja migran di negara ini.

27 www.khaleejtimes.com

28 www.reuters.com

berfungsi dan tersedia selama penghentian pabrik (air, sanitasi, makanan, penyimpanan, pemanas). Pekerja migran juga harus memiliki akses ke area karantina yang memadai dengan tenaga kesehatan, sanitasi dan logistik yang cukup.²⁹

Negara-negara, seperti Bahrain, telah menetapkan tanggung jawab khusus pengusaha (dan pekerja) di sektor swasta untuk memastikan akomodasi dan fasilitas yang sesuai untuk melindungi pekerja migran selama pandemi.³⁰

Berilah semua pekerja migran akses ke proses hukum atas perlakuan yang tidak adil. Semua pekerja migran, termasuk mereka yang mungkin menjadi berstatus tidak berdokumen atau iregular, harus memiliki akses ke proses hukum untuk perlakuan tidak adil, termasuk terkait dengan pemotongan atau tidak dibayarnya upah, penolakan hak-hak lain dan diskriminasi di tempat kerja, dan memiliki akses ke layanan penasihat hukum dan penerjemah jika perlu.

Kerjasama bilateral dan multilateral bagi pekerja migran dan keluarganya dapat memastikan perlindungan, kepulungan yang aman dan reintegrasi efektif ke pasar tenaga kerja

Untuk pekerja migran yang berstatus ilegal atau kembali pulang, kerja sama yang kuat dengan negara asal mengenai amnesti, legalisasi, pertukaran informasi dan proses kepulungan dapat memastikan perlindungan dan pemulangan yang lebih lancar (termasuk pemrosesan dokumen) serta dukungan untuk pengakuan keterampilan dan langkah-langkah lain guna memfasilitasi reintegrasi yang efektif ke

pasar tenaga kerja. Misalnya, kerja sama bilateral (dan sub-regional) dapat memfasilitasi dukungan ekonomi bagi migran yang kehilangan pekerjaan atau membantu mempersiapkan mereka untuk masuk kembali ke pasar tenaga kerja dalam negeri. Filipina memperluas tunjangan keuangan untuk pekerja migran di luar negeri dan, bersama dengan Hongkong (Cina), membantu memastikan bahwa pekerja migran Filipina tetap dapat melakukan perjalanan bila mereka memiliki kontrak kerja yang sah dan didukung oleh agen perekrutan dan proses perekrutan yang adil di kedua ujung koridor migrasi, termasuk bagi pekerja rumah tangga migran.³¹ Negara-negara lain juga menyerukan solidaritas dengan para migran.³²

Pengakuan keterampilan bagi pekerja migran untuk mengambil peluang kerja yang tercipta di sektor perawatan kesehatan dan sektor-sektor lain juga dapat membantu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dan mendorong reintegrasi pekerja ke dalam pekerjaan di negara asal. Peru dan Argentina, misalnya, sedang mengembangkan prosedur yang dipercepat untuk pengakuan kualifikasi profesional migran Venezuela di negara tujuan, setidaknya selama masa respons terhadap pandemi COVID-19.³³ Serikat pekerja juga bekerja sama lintas batas, misalnya antara Malaysia dan Bangladesh, dengan berbagai dukungan pekerja migran, termasuk distribusi makanan.³⁴ India telah mengirim tim medis untuk mendukung Kuwait, yang menampung sekitar satu juta pekerja migran India.³⁵

Beberapa negara asal meningkatkan langkah-langkah unilateral atau layanan konsuler di negara tujuan. Mereka membentuk saluran bantuan khusus, situs, titik fokus di kementerian lini dan pertukaran informasi yang menyoroti kebutuhan khusus warga negara mereka yang bekerja di luar negeri, termasuk layanan informasi, bantuan hukum dan dukungan kemanusiaan bagi pekerja yang terdampak (misalnya India³⁶ Srilanka,³⁷ Pakistan,³⁸ Bangladesh³⁹) termasuk memberikan layanan kedaruratan kepada pekerja migran mereka.

29 Lihat, misalnya, Langkah untuk Mengurangi COVID-19 terkait tantangan di zona industri yang memenuhi syarat (QIZ), Ini adalah serangkaian langkah yang disarankan yang disiapkan oleh Pusat Pekerja Al-Hassan ILO, Yordania

30 Surat edaran administrasi Kementerian Ketenagakerjaan dan Pembangunan Bahrain menetapkan tanggung jawab pengusaha (dan pekerja) di sektor swasta (termasuk pengusaha dengan pekerja di kamp-kamp kerja) untuk memastikan bahwa (1) akomodasi pekerja menampung jumlah pekerja yang dikurangi di sebuah kamar; (2) pekerja harus setidaknya berjarak tiga meter satu sama lain di sebuah ruangan; (3) fasilitas toilet dan sanitasi di kamp kerja ditingkatkan; dan (4) pengusaha menyediakan fasilitas isolasi untuk merawat pekerja jika dinyatakan positif COVID-19. Pengawas ketenagakerjaan juga akan tetap melakukan pemeriksaan di kamp-kamp kerja.

31 Kasus dukungan khusus untuk pekerja migran Filipina difasilitasi oleh Fair Employment Agency (FEA), yang memastikan aliran informasi yang transparan kepada pengusaha dan pekerja melalui situs dan penyebaran selebaran. Informasi kepada pengusaha mencakup saran tentang pemrosesan dokumentasi, pembatasan perjalanan, meninggalkan rumah wajib dan cara menundanya dan diskusi dengan pekerja rumah tangga tentang pembayaran upah, antara lain. Saran untuk pekerja rumah tangga mencakup informasi tentang COVID-19, cara mencari bantuan medis, negosiasi upah, pemutusan kontrak, jalan untuk dukungan, tindakan karantina dan rekomendasi bahwa pengusaha harus menambah biaya yang mungkin dikeluarkan, misalnya untuk biaya perpanjangan visa, biaya transportasi tambahan atau penyelesaian PHK.

32 Perdana Menteri India dan Nepal menekankan untuk merawat warga yang terjebak di negara satu sama lain karena karantina sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan tahun 1950 antara kedua negara.

33 Lihat, misalnya, www.lanacion.com; www.telemetro.com.

34 www.ilo.org/asia.

35 <https://economictimes.indiatimes.com>

36 www.indiatoday.in

37 Srilanka membuat portal informasi daring, "Contact Sri Lanka", untuk warga Srilanka di luar negeri, termasuk pekerja migran, untuk memberikan dukungan segera.

38 Misi Pakistan di luar negeri memuat hotline 24/7 untuk membantu komunitas diaspora dengan mengangkat narafokus.

39 www.ophrd.gov.pk

Kebijakan berdasarkan dialog sosial dan keterlibatan penuh organisasi pengusaha dan pekerja dapat mendorong pencakupan pekerja migran dalam respons nasional

Tindakan bersama pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja dalam mengembangkan respons kebijakan COVID-19 dapat membantu menangani banyak masalah pasar tenaga kerja, termasuk kesehatan dan keselamatan dan kondisi kerja yang memadai, dukungan untuk bisnis dan perusahaan kecil, perluasan perlindungan sosial dan pertimbangan peluang kerja bagi pekerja migran. Organisasi Pengusaha Internasional (IOE) dan Konfederasi Serikat Pekerja Internasional (ITUC) mengeluarkan pernyataan bersama tentang COVID-19 yang menyerukan peningkatan koordinasi semua pelaku dan agar lembaga keuangan internasional mendukung langkah-langkah dan kebijakan sosial-ekonomi. Seruan tersebut lebih lanjut menyerukan “dengan sangat” dialog sosial dan tentang peran penting mitra sosial.⁴⁰

Selama tahap awal wabah COVID-19, sejumlah negara dan mitra sosial mereka telah menerapkan langkah-langkah tegas untuk memerangi penyebaran penyakit tersebut, seraya berupaya mengurangi dampak buruknya terhadap perekonomian dan pasar tenaga kerja.⁴¹ Misalnya, dialog sosial di Filipina membantu mendorong langkah-langkah bantuan keuangan bagi pekerja Filipina di luar negeri yang terlantar karena COVID-19.⁴²

Organisasi pengusaha dan pekerja juga dapat mengambil langkah-langkah bermanfaat dalam kapasitas masing-masing. IOE, misalnya, telah menerbitkan *Guide for surviving COVID-19*⁴³ dengan rekomendasi dan strategi praktis untuk bisnis,

termasuk dalam berkomunikasi dengan pekerja dan mengambil tindakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Panduan Pengusaha dari ILO mengakui bahwa pekerja migran merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap COVID-19 dan memberikan panduan rinci tentang bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang tidak mendiskriminasi atau menstigma orang-orang yang telah terjangkit virus tersebut.⁴⁴ Saran praktis diberikan mengenai berbagai hal yang harus dipertimbangkan oleh pengusaha, misalnya menetapkan kebijakan sensitif gender yang mencakup pekerja migran, penyandang disabilitas dan kelompok minoritas, yang mendorong pekerja untuk secara proaktif melaporkan insiden pelecehan dan membangun mekanisme pengaduan guna menghindari dan mencegah diskriminasi yang tidak sah, pelecehan atau kekerasan terhadap pekerja atau anggota keluarganya yang telah tertular COVID-19.⁴⁵

Serikat pekerja juga aktif membantu mendukung promosi dan perlindungan hak-hak pekerja, termasuk pekerja migran, selama pandemi di masyarakat terdampak. Organisasi serikat pekerja internasional, misalnya ITUC,⁴⁶ ETUC,⁴⁷ TUCA⁴⁸ membuat ruang khusus di situs mereka untuk mengumpulkan informasi dari afiliasi mereka atau untuk menunjukkan tindakan membela hak-hak pekerja selama pandemi yang mencakup hak-hak pekerja migran. ILO mengumpulkan dan memperbarui informasi tentang tanggapan publik terhadap krisis COVID-19 dan implikasinya bagi pekerja.⁴⁹

Di sejumlah kawasan dan negara, Federasi Serikat Pekerja Global dan serikat pekerja lokal memfokuskan upaya mereka pada perlindungan hak-hak pekerja migran⁵⁰ dengan: mengadvokasi hak-hak mereka⁵¹ (misalnya, Southern African Trade Union Coordination Council (SATUCC) menyerukan perhatian khusus pada situasi pekerja migran⁵²; Réseau Migration Syndical Méditerranéennes Subsahariennes (RSMMS), atas nama 30 organisasi anggotanya dari Afrika Utara dan Barat dan Eropa Selatan, menyerukan serangkaian

40 Pernyataan bersama IOE dan ITUC, www.ioe-emp.org.

41 Situs ini memungkinkan mencari dan mengetahui di suatu negara atau wilayah langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi pekerja, dan upaya-upaya yang mengandalkan dialog sosial. Lihat ILO www.ilo.org

42 Pada tanggal 14 April, misalnya, the National Tri-partite Industrial Peace Council (NTIPC) Departemen Perburuhan dan Ketenagakerjaan (DOLE) mengadakan pertemuan di mana perwakilan serikat pekerja mempresentasikan naskah pendapat mereka mengenai pelaksanaan Perintah Departemen (DO) 212 DOLE yang baru dikeluarkan tentang bantuan keuangan yang akan diberikan kepada pekerja Filipina di luar negeri yang terlantar karena COVID-19.

43 Lihat, www.ioe-emp.org

44 Lihat, ILO Bureau for Employers' Activities (ILO-ACT/EMP), www.ilo.org.

45 Ibid., hlm. 28.

46 www.ituc-csi.org

47 www.etuc.org

48 <http://csa-csi.org>

49 The ILO Bureau for Workers Activities (ACTRAV), www.ilo.org/actrav; lihat juga analisis respons pemerintah ACTRAV, www.ilo.org/actrav

50 Lihat, misalnya, International Transport Workers' Federation (ITF): www.itfglobal.org; Public Services International (PSI): <https://publicservices.international>; Blog: Beyond health workers, millions more need better conditions to beat Covid-19; European Public Services Union (EPSU): www.epsu.org; Education International (EI): Tracker of newest developments + statement; IndustriAll: www.industriall-union.org; UNI Global Union: <https://uniglobalunion.org>; IUF (Food, Farm and Hotel Workers): www.iuf.org; International Federation of Musicians (FIM): www.fim-musicians.org; BWI: www.bwint.org; International Federation of Journalists (IFJ): Covid-19: Report Safely; International Federation of Musicians (FIM): Covid-19

51 www.ituc-csi.org

52 www.ituc-csi.org

langkah perlindungan bagi pekerja migran⁵³), termasuk akses ke layanan kesehatan (misalnya, Tunisia,⁵⁴ Bahrain dan Kuwait⁵⁵) dan melalui konseling dan informasi tentang tunjangan pendapatan dan tunjangan sosial yang menjadi hak mereka selama wabah COVID-19 (misalnya, Italia)⁵⁶ dan tentang perlindungan upah dan kelayakan menerima asuransi selama krisis COVID-19 (misalnya, Kanada).⁵⁷

► Bagaimana ILO membantu

Ketika dunia meningkatkan perjuangan untuk mencegah penyebaran pandemi, penting untuk memastikan bahwa pekerja migran tidak dirugikan secara berlebihan. Pelaksanaan hak asasi manusia pekerja migran dan standar ketenagakerjaan internasional semakin penting selama pandemi dengan meningkatnya tingkat xenofobia, kekerasan dan pelecehan, dan ketegangan sosial. Memastikan kondisi kerja yang sama dan akses terhadap keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dan perlindungan sosial, sejalan dengan non-migran, sangatlah penting.

ILO mengambil langkah konkret ke arah ini. ILO membantu untuk mendukung: pengambilan kebijakan berbasis bukti melalui penciptaan alat pemantauan dan penilaian cepat, dan serikat pekerja dan Pusat

Sumber Daya Pekerja Migran (MRC) mengedarkan kuesioner untuk menilai dampak COVID-19 terhadap kesehatan dan mata pencarian pekerja migran, seraya memberikan bantuan untuk pemulihan biaya migrasi dan upah yang belum dibayar dan, jika diperlukan, alat kesehatan untuk migran yang kembali pulang.⁵⁸ Di tingkat regional di Asia dan Timur Tengah, sejumlah upaya khusus di tingkat negara sedang berlangsung. Misalnya, ILO menawarkan dukungan kepada Pemerintah Qatar dalam menyusun pedoman kesehatan dan ketenagakerjaan bagi semua pekerja⁵⁹ dan kepada Komisi Nasional Perempuan di India dalam menerbitkan pedoman perlindungan pekerja migran perempuan dalam negeri.

Bersama dengan para mitranya, ILO sedang mereorientasi kegiatan kerja sama pengembangan untuk membantu pemerintah di Afrika, Asia dan Amerika Latin memastikan kesehatan dan keselamatan, perlindungan sosial dan kebijakan ekonomi nasional yang mencakup semua pekerja migran. Untuk membantu menangani tantangan reintegrasi pekerja migran yang kembali ke pasar tenaga kerja, ILO memperbarui pedoman teknis dan perangkatnya, termasuk pengakuan keterampilan dengan pelaksanaan yang tersasar di berbagai negara dan wilayah. Tantangannya adalah meningkatkan upaya ini dengan cepat guna mendukung upaya nasional memastikan pekerja migran tidak tertinggal dalam respons COVID-19 nasional ketika negara-negara bergerak melampaui pandemi ini.

53 <https://publicservices.international>

54 www.tap.info.tn

55 Dewan Pusat General Federation of Bahrain Trade Unions (GFBTU) mengalokasikan BD 15.000 (USD 40.000) untuk mendukung pekerja migran di Bahrain dengan bantuan kemanusiaan. Dengan Komite Pekerja Migran GFBTU, mereka mensurvei dampak COVID-19 pada pekerja migran dan cara terbaik untuk membantu. Kuwait Trade Union Federation menganjurkan sejumlah langkah untuk perlindungan pekerja migran, www.solidaritycenter.org

56 FILLEA-CGIL menyarankan sejumlah langkah perlindungan pekerja migran, www.bwint.org

57 UFCW Kanada, dan Agriculture Workers Alliance (AWA), dan aliansi komunitas mereka telah mencapai perlindungan upah dan kelayakan Asuransi Ketenagakerjaan untuk pekerja migran dan pekerja asing sementara yang diberhentikan, jatuh sakit atau harus dikarantina karena COVID-19. Selain itu, pemerintah federal telah setuju untuk menghapus pelarangannya – yang dilembagakan sebagai respons terhadap pandemi coronavirus – pada pekerja pertanian asing dan migran sementara yang berupaya memasuki Kanada untuk bekerja. www.ufcw.ca lihat misalnya, www.ilo.org/beirut

58 Dukungan di bawah proyek ILO TRIANGLE, Safe and Fair, DIILM dan MWEA di negara-negara Asia. Dukungan ILO untuk Pusat Sumberdaya Migran Confederation of Trade Unions of Myanmar (CTUM) di Yangon membantu migran mendapatkan kembali biaya migrasi dari pembatasan COVID-19, dan bagi pekerja migran yang pulang untuk mendapatkan upah atau hak yang tidak dibayar. Di Bago, dengan 6.000 orang yang pulang dalam satu minggu, CTUM menyediakan paket perawatan dan dukungan APD.

59 Lihat misalnya, www.ilo.org/beirut

► Dokumen panduan lebih lanjut dan sumberdaya lain

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97), and Migration for Employment Recommendation (No. 86)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) and Migrant Workers Recommendation 151

General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment Guiding Principles on access of refugees to the labour market

ILO Standards and COVID 19

ILO and UN Network on Migration statement on impacts of COVID-19 to migrant workers

Interim Guidance on Scaling-up COVID-19 Outbreak Readiness and Response Operations in Humanitarian, Camps and Camp-like Situations'

Interim Guidance on Preparedness, prevention and control of coronavirus disease (COVID-19) for refugees and migrants in non-camp settings (17 April 2020)

Covid-19 and the Human Rights of Migrants, 7 April 2020, OHCHR Migrant workers and the COVID-19 pandemic, 7 April 2020, FAO

El impacto del COVID-19 en el mercado de trabajo y en las personas trabajadoras refugiadas y migrantes / Studies on the Venezuelan migrants situation co-led by ILO

Impact of COVID-19 on migrant workers in Lebanon and what employers can do about it COVID-19: Impact on migrant workers and country response in Thailand, Update: 17 April 2020 COVID-19: Impact on migrant workers and country response in Malaysia, 14 April 2020

Thematic brief: Recommendations for Asian garment manufacturers on how to address the COVID-19 pandemic

Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189), and Domestic Workers Recommendation, 2011 (No. 202). ILO Global Estimates on International Migrant Workers

ILO Multilateral Framework on Labour Migration

Managing Conflicts and Disasters: Exploring Collaboration between Employers' and Workers' Organizations

► Informasi kontak:

International Labour Organization
4, Route des Morillons
CH-1211 Geneva 22 – Switzerland

T: +41 22 799 6754
E: inwork@ilo.org
www.ilo.org/informaleconomy